

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk hukum badan usaha yang terdapat di Indonesia. Perseroan Terbatas terdiri dari PT. Terbuka atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya ke Bursa Efek, PT. Tertutup atau perseroan terbatas yang kepemilikan modalnya masih sebatas setoran pemilik, serta PT. Persero atau Badan Usaha Milik Negara yang sudah menjual sahamnya ke publik (*go public*). Perseroan terbatas yang sudah *go public* baik perusahaan milik pemerintah (BUMN) maupun milik swasta mendapatkan pendanaan dari menerbitkan saham perusahaannya.

Pendanaan perusahaan-perusahaan *go public* tidak sebatas menerbitkan saham maupun obligasi namun juga mendapatkan pendanaan dari kreditur lainnya misalnya pinjaman dari bank baik lokal maupun bank asing. Sehingga perusahaan *go public* memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerja manajemen dalam mengatur perusahaannya. Manajemen dituntut untuk melaporkan semua peristiwa-peristiwa penting yang mampu membuat pihak eksternal atau pemberi dana baik pemegang saham maupun kreditur merasa nyaman telah berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap entitas-entitasnya, manajemen menerbitkan laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) laporan keuangan merupakan bentuk proses pelaporan

keuangan. Tujuan dari penerbitan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi bagi pengguna baik pengguna internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja manajemen, laporan posisi keuangan, serta perubahan-perubahan posisi keuangan yang informasi didalamnya dapat berguna untuk pengambilan keputusan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Tujuan utama dari penggunaan laporan keuangan menurut Kieso *et al.* (2011a: 42) untuk menyediakan informasi keuangan kepada entitas pelaporan yang berguna untuk keputusan investor, pemberi pinjaman (kreditor) dan kreditor lainnya dalam pengambilan keputusan sebagai penyedia dana. Manajemen harus mampu menyediakan laporan keuangan yang sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa didalamnya. Laporan keuangan haruslah relevan dan dapat dipercaya sesuai dengan kerangka konseptual untuk laporan keuangan (Kieso *et al.*, 2011a).

Pemegang saham, kreditor, dan pengguna lainnya mempunyai kepentingan untuk membaca hasil laporan keuangan, namun para pemakai laporan keuangan pastinya sulit untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan. Sehingga, manajemen menggunakan jasa audit untuk menilai kewajaran dan kehandalan laporan keuangan, yang dimana hasil audit dapat dijadikan jembatan bagi investor untuk memahami kondisi perusahaan tersebut (Boynton & Johnson, 2006: 18-17). Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit atas permintaan manajemen perusahaan namun jasa audit yang dilakukan tidak semata-mata berpihak kepada manajemen, auditor harus mempertimbangkan kepentingan publik, pemegang saham, dan para pemegang kepentingan potensial lainnya serta mempertimbangkan

independensi, integritas, dan ketidak berpihakannya (Boynton & Johnson, 2006: 49)

Jasa audit yang dilakukan oleh auditor independen lebih membuat para pengguna laporan keuangan merasa nyaman dalam mengambil keputusan. Kualitas audit laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor dianggap mampu mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh para investor dan kreditur serta auditor mampu mentransfer informasi menjadi pengetahuan yang dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengantisipasi dan mengatur beberapa peluang di dalam pengambilan keputusannya (Boynton & Johnson, 2006).

Mgbame *et al.* (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan auditor akan menemukan dan mengungkapkan error, kesalahan, dan kelalaian laporan keuangan yang terdeteksi di sistem informasi akutansinya. Sedangkan Hartadi (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kualitas auditor dalam pelaksanaan jasa audit bergantung pada dua hal yaitu kemampuan auditor yang dapat ditunjukkan melalui pengalaman maupun pendidikannya dan kualitas auditor dalam menjaga sikap mental sebagai auditor.

Sedangkan menurut Boynton and Johnson (2006: 20-21) auditor yang independen juga dibutuhkan untuk mengatasi kondisi-kondisi seperti konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik atau pemegang saham, konsekuensi penerbitan laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan pendanaan, investasi dan keputusan lainnya, kompleksitas laporan keuangan

untuk mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan informasi, serta mempersingkat waktu, jarak serta biaya yang dikeluarkan oleh pengguna laporan keuangan untuk mencari secara langsung transaksi yang dilakukan secara ilegal. Independensi juga merupakan salah satu faktor kualitas audit dalam menjaga mentalnya sebagai seorang auditor (Hartadi, 2012).

Dalam ISA 200.3 disebutkan bahwa tujuan audit adalah meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan (Tuanakotta, 2013: 84). Tujuan audit tersebut dapat dicapai jika auditor menghasilkan kesimpulan dalam bentuk pemberian opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan, dan disimpulkan sesuai dengan kerangka konseptual jika auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut wajar dan segala informasi yang disajikan menggambarkan kebenaran dengan segala hal yang material maka tujuan audit untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan tercapai (Tuanakotta, 2013).

Menurut Tuanakotta (2013: 89) di dalam bukunya yang sudah berbasis *International Standard of Auditing (ISAs)* auditor diharapkan menekan resiko audit ke tingkat yang paling rendah untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Tuanakotta (2013) menjelaskan bahwa disebut resiko audit apabila auditor memberikan opini yang tidak tepat pada laporan keuangan yang menyajikan informasi yang salah saji secara material. Resiko tersebut terjadi ketika auditor tidak dapat menemukan temuan yang material sehingga salah dalam memberikan opini audit.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal tersebut dibuktikan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Cousin and Ika S (2010) dimana independensi juga berpengaruh terhadap kualitas audit, karena semakin seorang auditor bersikap idealis, semakin meningkat pula independensi seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan. Dan sebaliknya semakin realistis sifat seorang auditor maka semakin menurun pula independensi seorang auditor dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan (Cousin & Ika S, 2010).

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas audit adalah akuntabilitas dan kompetensi auditor, hal tersebut dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyati and Suhardjo (2012) dan Al-Khaddash *et al.* (2013). Ilmiyati and Suhardjo (2012) juga menyimpulkan bahwa motivasi dan kewajiban sosialnya dalam mengungkapkan kewajaran laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sehingga semakin tinggi motivasi dan kewajiban sosialnya maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Sedangkan Ilmiyati and Suhardjo (2012) dan Al-Khaddash *et al.* (2013) juga membuktikan bahwa kompetensi atau kecakapan seorang auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, semakin luas seorang auditor menguasai kemampuan audit dan seorang auditor mempunyai audit spesialisasi industri tertentu akan meningkatkan hasil auditnya.

Beberapa pengguna laporan keuangan mempercayai kualitas audit yang dilakukan oleh auditor dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik yang dinaunginya, misalnya saja kantor-kantor akuntan publik *Big Four* yang terdiri dari PricewaterhouseCoopers International, Ernest & Young Global Limited,

Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dan KPMG International Cooperative. Banyak yang mempercayai jika opini-opini yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four* diungkapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada perusahaan yang sedang diauditnya.

Al-Khaddash *et al.* (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu efisiensi audit, reputasi audit, dan audit fee. Auditor yang mempunyai kemampuan spesialisasi industri dalam melakukan audit dapat meningkatkan efisiensi audit karena auditor yang mempunyai pengetahuan untuk memahami peraturan, instruksi, dan standar menjadi suatu keunggulan tersendiri dalam menyelesaikan proses audit (Al-Khaddash *et al.*, 2013). Dalam penelitiannya pula. Al-Khaddash *et al.* (2013) juga menyimpulkan bahwa KAP yang memiliki reputasi yang baik akan lebih handal dan terpercaya dalam menerbitkan opini serta *fee* dan *reward* yang diberikan kepada auditor juga dapat meningkatkan kinerja seorang auditor yang keduanya berpengaruh kepada kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Boynton and Johnson (2006: 272) kantor akuntan publik yang satu dengan kantor akuntan publik yang lain harus mempertimbangkan persaingan dalam mendapatkan klien, auditor tidak dapat menjamin memberikan keterangan mengenai performa laporan keuangan sesuai permintaan klien atau entitas, serta dalam menerima perikatan audit, auditor harus mempertanggung jawabkan profesionalisme profesi auditor kepada klien mereka. Auditor harus mendemonstrasikan prinsip auditor yang diantaranya independensi, integriti,

objektivitas, mempertahankan skeptisisme audit serta memetingkan kepentingan publik atau kepentingan pengguna laporan keuangan (Boynton & Johnson, 2006).

Lamanya perikatan audit dapat dijadikan acuan seberapa kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Menurut Werastuti (2013) semakin singkat perikatan audit yang dilakukan oleh auditor dengan kliennya, maka akan semakin rendah kemungkinan klien mendapatkan opini audit *going concern*. Namun pendapat lain mengatakan semakin singkat atau jika klien menerima perikatan baru, maka semakin rendah kualitas audit yang dilakukan oleh auditor (Mgbame *et al.*, 2012).

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa semakin lama perikatan atau jika auditor melanjutkan penugasan dengan klien yang sama maka meningkatkan kualitas audit, karena semakin lama perikatan maka semakin berkurang asimetris informasi antara klien dengan auditor (Mgbame *et al.*, 2012). Namun semakin lama perikatan terjalin seperti kasus Enron, dimana KAP Andersen sudah menjadi auditornya sejak Enron berdiri juga akan menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu semakin lama terjalin perikatan, semakin mengerti pula auditor tentang lingkungan bisnis klien, maka semakin menimbulkan kecurigaan bahwa independensi auditor melemah (Mgbame *et al.*, 2012).

Independensi auditor adalah prinsip yang harus ada pada setiap auditor sehingga auditor akan mengurangi resiko audit atau resiko tanpa sengaja memodifikasi opini audit. Auditor harus bersikap profesional dalam meminimalkan resiko audit melalui surat perikatan, auditor dapat memutuskan untuk melanjutkan penugasan atau mengakhiri penugasan jika manajemen sudah mulai melemahkan independensi auditor (Boynton & Johnson, 2006: 169).

Perikatan jasa audit di Indonesia sebenarnya sudah ada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 dimana untuk kantor akuntan publik hanya dapat melakukan jasa audit selama enam (6) tahun buku dan untuk auditor selama tiga (3) tahun buku (Menteri Keuangan, 2008).

Manajemen selaku pengelola perusahaan juga akan melakukan beberapa cara agar kinerja perusahaannya tetap terlihat baik, salah satunya dengan melakukan *opinion shopping*. *Opinion shopping* merupakan upaya manajemen untuk menunda atau menghindari penerimaan audit *going concern* yang diberikan oleh auditor dengan melakukan pergantian auditor dengan maksud auditor yang baru tidak menerbitkan opini audit *going concern* (Irfana & Muid, 2012). Dalam penelitiannya Ardiani *et al.* (2012) menyatakan bahwa manajemen akan melakukan penggantian auditor jika perusahaan kemungkinan akan mendapatkan opini yang tidak sesuai dengan harapan manajemen perusahaan. Manajemen mengharapkan dengan pergantian auditor yang baru maka perusahaan akan mendapatkan opini audit yang diharapkan karena penggantian auditor baru dapat menurunkan kualitas audit karena auditor belum memahami lingkungan bisnis perusahaan tersebut (Davidson *et al.*, 2006). Perusahaan akan melakukan posisi tawar-menawar dengan auditor barunya agar auditor baru tersebut menyediakan opini yang perusahaan inginkan (Stocken, 2000).

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Irfana and Muid (2012) menyatakan bahwa *opinion shopping* berpengaruh terhadap opini audit. Hal tersebut terjadi karena manajemen melakukan pencarian auditor yang bersedia untuk mendukung perlakuan akuntansi perusahaan tersebut dengan tujuan

memanipulasi laporan keuangan yang mempresentasikan kondisi perusahaan (Irfana & Muid, 2012). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani *et al.* (2012), di dalam penelitiannya diungkapkan bahwa *opinion shopping* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* yang juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Praptitorini and Januarti (2011). Karena dimungkinkan dalam prakteknya di Indonesia, *opinion shopping* terjadi pada perusahaan yang mempertahankan auditor yang lama. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen mengancam untuk melakukan pergantian auditor yang membuat auditor akhirnya tidak menerbitkan opini *going concern* untuk mempertahankan kliennya (Ardiani *et al.*, 2012).

Hendrickson and Espahbodi (1991) menyatakan bahwa kenapa auditor juga setuju untuk menerima praktek tersebut walaupun praktek tersebut mengabaikan independensi seorang auditor. Alasan seorang auditor menerima praktek tersebut antara lain dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu kompensasi atau tunjangan yang akan diterima, auditor akan memberikan pelayanan audit tahun-tahun berikutnya, dan faktor lainnya yaitu ketatnya persaingan antar KAP yang membuat auditor menerima dan melakukan praktek tersebut (Hendrickson and Espahbodi, 1991). Tentu saja dengan melakukan praktek *opinion shopping*, independensi auditor akan menurun yang juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor dalam mengeluarkan opininya adalah pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*). Kieso *et al.* (2011b: 1314) menjelaskan bahwa *disclosure* merupakan

salah satu prinsip yang terdapat di dalam kerangka konseptual untuk laporan keuangan. Prinsip pengungkapan penuh atau *full disclosure principle* merupakan prinsip dimana laporan keuangan tersebut mengandung informasi-informasi keuangan yang signifikan yang dapat mempengaruhi penggunaanya dalam pengambilan keputusan (Kieso *et al.*, 2011b: 1314).

Penyediaan pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*) merupakan elemen penting dalam peningkatan nilai substansial karena beberapa alasan diantaranya, kompleksitas bisnis/perusahaan yang dijalankan oleh manajemen membantu pengguna laporan keuangan memahami kegiatan operasional perusahaan, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dijadikan acuan dalam memprediksi investasi masa depan oleh para pengguna laporan keuangan, serta pengungkapan laporan keuangan sebagai alat untuk mengontrol serta memonitoring kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada (Kieso *et al.*, 2011b: 1315).

Laporan keuangan diharapkan tidak terdapat kesenjangan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Namun jika laporan keuangan mengandung kesenjangan informasi, maka proses audit diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Auditor harus mampu menemukan bukti-bukti adanya kesenjangan informasi yang diungkapkan, dimana dalam mengumpulkan bukti hingga menyimpulkan pendapat seorang auditor diharapkan memiliki keahlian yang memadai agar tidak menerbitkan opini yang tidak sesuai dengan kondisi

perusahaan sehingga keahlian tersebut dapat meningkatkan kualitas audit seorang auditor (Ilmiyati & Suhardjo, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Dunn and Mayhew (2004) mengungkapkan bahwa kemampuan auditor untuk menyediakan peningkatan pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan peningkatan kualitas audit, auditor perusahaan sesuai spesifikasi dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan yang juga berdampak peningkatan kualitas audit. Di dalam ISA 700.13 (Tuanakotta, 2013: 512) mengenai pertimbangan syarat dalam kerangka laporan keuangan menyebutkan auditor harus mempertimbangkan persyaratan kerangka laporan keuangan dalam melakukan pekerjaan audit, apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan kerangka konseptual untuk laporan keuangan termasuk di dalamnya prinsip pengungkapan penuh.

Pekerjaan auditor semakin mudah dengan adanya *disclosure*, karena auditor dapat menilai kinerja manajemen serta kondisi perusahaan dengan memeriksa catatan atas laporan keuangan (Ardiani *et al.*, 2012). Namun Ardiani *et al.* (2012) juga menyebutkan jika auditor mengeluarkan opini yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan, maka informasi buruk yang dapat mempengaruhi pendanaan maupun peminjaman atau yang berpengaruh buruk terhadap keputusan pengguna laporan keuangan tidak akan diungkapkan oleh manajemen ataupun oleh pimpinan perusahaan.

Disclosure sangat berguna bagi pemakai laporan keuangan, karena dari pengungkapan laporan keuangan para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui kondisi perusahaan dalam keadaan keuangan yang baik atau buruk,

dalam keadaan mampu membayar hutang yang sudah jatuh tempo atau dalam keadaan tidak mampu membayar hutang sering didefinisikan dengan *debt default* (Chen & Church, 1992). Kegagalan (*default*) yang dialami oleh perusahaan dalam membayar hutangnya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut dan terancam pula macetnya pendanaan dari investor karena menurunnya nilai perusahaan (Irfana & Muid, 2012).

Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiani *et al.* (2012) dan Irfana and Muid (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani *et al.* (2012) menyatakan bahwa *debt default* berpengaruh terhadap opini *going concern* yang juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Werastuti (2013) dengan alasan bahwa pada masa krisis ekonomi di Indonesia terjadi nilai tukar mata uang rupiah yang mengakibatkan perusahaan yang memiliki hutang dalam mata uang asing mengalami peningkatan nilai hutang yang berdampak pada ketidakmampuan perusahaan untuk melunasinya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irfana and Muid (2012) menyatakan bahwa *debt default* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* dikarenakan tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kondisi *debt default* akan mendapatkan opini *unqualified* dengan *going concern*.

Menurut penelitian dari Praptitorini and Januarti (2011) kegagalan perusahaan dalam membayar hutang dapat menimbulkan kemungkinan bahwa manajemen akan berusaha berkomunikasi dengan auditor, agar auditor tidak mengeluarkan opini yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kondisi

perusahaan yang dalam kondisi *default*, haruslah disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Auditor sebagai pihak ketiga yang mengaudit laporan keuangan tersebut juga harus memiliki akuntabilitas yang tinggi dimana auditor juga memiliki kewajiban sosial untuk mengungkapkan kondisi perusahaan melalui opini audit. Opini yang dikeluarkan oleh auditor sangatlah penting untuk pengambilan keputusan para pemegang saham, maka diharapkan akuntabilitas dari seorang auditor dapat menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Ilmiyati & Suhardjo, 2012).

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, penulis mencoba melakukan penelitian terhadap perusahaan di sektor keuangan (2010-2013) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Beberapa penelitian beberapa tahun lalu hanya meneliti perusahaan manufaktur atau perusahaan non-keuangan dikarenakan *leverage* perusahaan non-keuangan dapat dijadikan acuan. Sedangkan perusahaan keuangan, *leverage* tinggi bukanlah salah satu faktor perusahaan tersebut dalam kondisi keuangan yang buruk, namun perusahaan keuangan dengan *leverage* tinggi sangatlah normal. Penelitian-penelitian terdahulu belum tergeneralisasi, hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan non-keuangan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengeneralisasi pada perusahaan-perusahaan keuangan juga. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Auditor dan Klien Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Keuangan periode 2010-2013 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah apakah karakteristik auditor dan klien mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan keuangan periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik auditor dan klien terhadap kualitas audit pada perusahaan keuangan periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta wawasan kepada para akademisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
2. Bagi para profesi akuntan publik hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada praktisi profesi akuntan publik khususnya kepada auditor untuk meningkatkan kualitas audit.
3. Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan wajar-wajarnya untuk meningkatkan kepercayaan pemegang kepentingan.

4. Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan dalam mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang memberikan informasi yang benar dan wajar.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang berhubungan satu dengan lainnya. Secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori diantaranya *agency theory*, kualitas audit, opini audit *going concern*, *audit tenure*, *opinion shopping*, *disclosure*, dan *debt default*.

Bab ini juga menyertakan kerangka pemikiran dalam untuk memperjelas maksud penelitian dan hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, lokasi penelitian yang dipilih adalah perusahaan sector keuangan yang terdaftar di BEI, populasi dan sampel penelitian yang terdiri atas objek yang ditentukan dengan karakteristik tertentu sehingga memenuhi kriteria yang di harapkan, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh dalam alamat resmi www.idx.co.id, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data menggunakan model analisis regresi logistik.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, deskripsi statistika masing-masing variabel pengukuran, pengujian hipotesis penelitian, dan interpretasi hasil penelitian yang diperoleh dengan argumentasi-argumentasi teoritis yang menguatkan hasil penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian dengan kesimpulan dan hasil penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.